DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Ali, Zainuddin.2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Fajar, Mukti.2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Fuady, Munir.1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti

_____. 2005. *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004).* Bandung : Citra Aditya Bakti

Jono,2008,*Hukum Kepailitan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud.2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Perdana Media

Masruhan. 2013.*Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka

Mertokusumo,Sudikno.2007.*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty

Mertokusumo,Sudikno dan A.Pitlo.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.* Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdul Kadir.2000. *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung : Citra Aditya Bakti

Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Sjahdeini, Sutan Remy.2009. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Cetakan Ke III,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Soemadipraja, S.S. Rahmat. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/ Force Majeure).* Jakarta : Nasional Legal Reform Program

Subekti.2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. 31*. Jakarta : Intermasa

_____.2004. *Hukum Perjanjian Cet. 20*. Jakarta : Intermasa

Sunarmi,2010.*Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta : Softmedia

Suyatno, R Anton.2012.*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta : Prenada Media Group.

Usman, Rahmadi. 2004.*Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Waluyo,Bambang.2002.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo,Bernadette.1999.*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby

Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby

Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

D. JURNAL

Anisah,Siti.2013. *Apakah Utang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih?.* Jurnal Hukum Bisnis Volume 32 Nomor 3 Tahun 2013 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tersedia Online Pada https://fh.uii.ac.id/Jurnal-Hukum-Bisnis-Vol-32-No-3-Tahun-2013.pdf//, diakses pada 4 Oktober 2020

Bachri, Bachtiar S. 2015. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Tringulasi Pada Penelitian Kualitatif.* Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1

Dewangker, Arie Exchell Prayogo.2020. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemik,* Jurnal Vol.8 No.3 Edisi Agustus.2020. E.ISSN.2614-6061/P.ISSN.2527-4295.Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan.2020. *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.* Jurnal Kertha Semaya Vol.8 No. 6 Tahun 2020, E-ISSN Nomor : 2303-0569 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tersedia Online Pada https://ojs.unud.ac.id//

E. SKRIPSI DAN TESIS

Sesia, Dita Okta. 2008. *Analisis Hukum Perbandingan Klausa Keadaan Darurat Force Majeure Antara Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan*. Depok : Skripsi Program Reguler Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tersedia Online Pada https://lib.ui.ac.id

Kusumaningrum, Marthasia.2011. *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepalitan Di Indonesia.* Semarang : Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

F. LAIN-LAIN

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, dalam webinar yang berjudul *Perkembangan, Probematika, Dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis*, diakses secara online melalui https://youtu.be/b0SpZw7XK4g dipublikasikan pada 25 April 2020

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.2020. *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*, Tersedia Online Pada https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetepkan-covid19-sebagai-bencana-nasional, diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020

Blc Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, webinar *Gagal Bayar Akibat Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Hukum Kepailitan*, diakses secara online melalui https://youtu.be/Y_KWQ4KVH-U dipublikasikan pada 24 Juni 2020

Hukum Online.2020. *Kepailitan Momok Menakutkan Di Masa Pandemi*. Tersedia Online Pada https://ww.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan-momok-menakutkan-di-masa-pandemi, diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020

Hukum Online.2020. *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona* Tersedia Online Pada https://m.hukumonline.com/berita/baca/penjelasan-prof-mahfud-soal-forcemajeure-akibat-pandemi-corona/ diakses pada hari Kamis 14 Januari 2021

Justitia Training Center, *Webinar Strategi Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Pandemi Covid-19* yang dilaksanakan pada hari Jum'at 22 Mei 2020 diakses secara online pada https://youtu.be/qlLQsluWg98

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-court 2019 The Electronic Justice System*. Diakses secara online melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Nusantara TV, *Wawancara Prof. Dr. Otto Hasibuan Tentang Force Majeure Terkait Wabah Covid-19*, diakses secara online melalui https://youtu.be/OyQly7XkRY0 dipublikasikan pada tanggal 22 April 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,Tersedia online pada http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/ diakses pada Sabtu 5 Desember 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Surabaya ,Tersedia Online pada https://sipp.pn-surabayakota.go.id/ diakses pada Sabtu 5 Desember 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Semarang,Tersedia Online pada https://sipp.pn-semarangkota.go.id/ diakses pada Sabtu 5 Desember 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Medan,Tersedia online pada https://sipp.pn-medankota.go.id/ diakses pada Sabtu 5 Desember 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Makassar,Tersedia online pada https://sipp.pn-makassar.go.id/ diakses pada Sabtu 6 Desember 2020

Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Sarwedi, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Pada Hari Senin 23 November 2020 Pukul 10.30 WIB

Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Khusani, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Pada Hari Kamis 25 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB